

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

2

0

2

0

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR**

DAFTAR ISI

daftar isi.....	1
kata pengantar	3
Ringkasan Eksekutif.....	4
BAB I Pendahuluan	6
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	6
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	6
b.1 Kedudukan :.....	7
b.2 Tugas :	7
b.3 Fungsi :	7
C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	9
D. ISU STRATEGIS.....	11
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
a.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020	16
a.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya	19
a.3 Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja Sasaran Tahun akhir periode Renstra.....	30
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN	33
b.1 Sasaran 1	33
b.2. Sasaran 2.....	36
C. REALISASI ANGGARAN	38
c.1 Analisa Efisiensi.....	41
D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2019.....	43
d.1. Evaluasi kinerja Tahun 2019.....	43
d.2. Tindak lanjut.....	43
BAB IV PENUTUP	44
A. KESIMPULAN.....	44
B. SARAN-SARAN	44
LAMPIRAN	45

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang dibebankan.

Sebagai salah unsur dari fungsi pembangunan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Martapura, Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banjar



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar 2016 - 2021 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2020 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 2 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Banjar tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian pada 2 sasaran strategis masuk pada kategori sangat baik dengan nilai rata - rata 179,525 %.

Tantangan keberhasilan sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar. Rincian anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah seperti berikut:

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBN	-	-
APBD	Rp. 4.671.428.096,-	100 %
APBD (Rasionalisasi)	Rp. 2.484.937.986,-	53,19 %
APBDP	Rp. 2.791.787.987,-	59,62 %

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar;
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Sebagai langkah antisipatif guna mengantisipasi kendala yang akan terjadi pada tahun berikutnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Penanaman Modal, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

B.1 KEDUDUKAN :

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS :

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

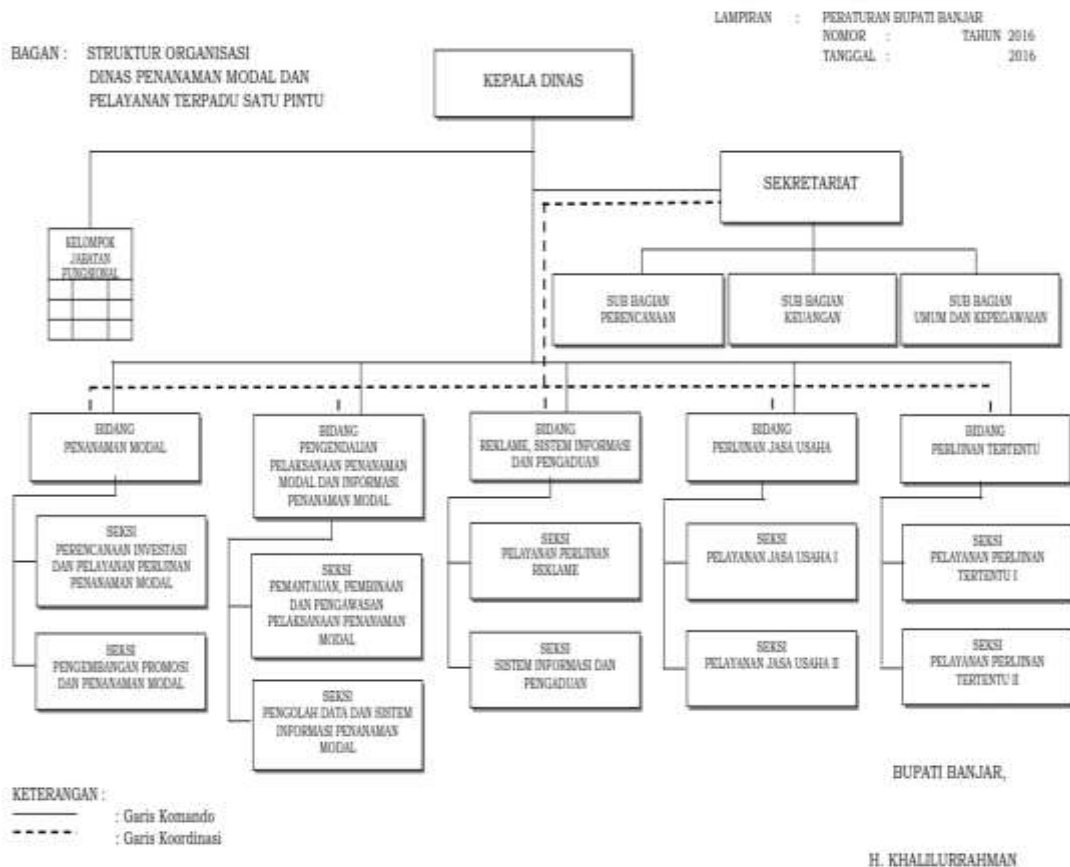
B.3 FUNGSI :

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanaman modal sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang penanaman modal;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. *Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;*
- b. *Sekretariat terdiri dari:*
 - 1. *Subbagian Umum dan Kepegawaian;*
 - 2. *Subbagian Keuangan; dan*
 - 3. *Subbagian Perencanaan*
- c. *Bidang Penanaman Modal:*
 - 1. *Subbidang Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; dan*
 - 2. *Subbidang Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal*
- d. *Bidang Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal:*
 - 1. *Subbidang Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal; dan*
 - 2. *Subbidang Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal*
- e. *Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan:*
 - 1. *Subbidang Pelayanan Perizinan Reklame; dan*
 - 2. *Subbidang Sistem Informasi, Pelayanan dan Pengaduan*
- f. *Bidang Perizinan Jasa Usaha:*
 - 1. *Subbidang Pelayanan Jasa Usaha I; dan*
 - 2. *Subbidang Pelayanan Jasa Usaha II*
- g. *Bidang Perizinan Tertentu:*
 - 1. *Subbidang Pelayanan Perizinan Tertentu I; dan*
 - 2. *Subbidang Pelayanan Perizinan Tertentu II.*



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang membantu Kepala Daerah dalam urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan pada dokumen perencanaan dilakukan melalui proses analisis pohon masalah kemudian diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah. Sehingga hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) dan disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel I

Tabel Permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya pertumbuhan investasi Daerah	Masih adanya tarik ulur kewenangan terkait perizinan dengan dinas teknis	Masih kurangnya pemahaman batas kewenangan DPMPTSP dengan Dinas Teknis
2.	Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan	Masih adanya keterlambatan proses perizinan akibat terlambatnya rekomendasi dari dinas teknis	Masih tergantungnya kecepatan pelayanan dengan dinas teknis pemberi rekomendasi
		Kesadaran masyarakat tentang perizinan masih rendah	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Perizinan usaha bagi mereka dan PAD bagi pembangunan daerah
		Masih terjadi pertentangan pendapat / opini terkait pelayanan dengan dinas teknis	Koordinasi dengan dinas teknis yang masih kurang
		Masih rendahnya kesadaran pegawai dalam hal disiplin	Tingkat disiplin SDM DPMPTSP yang masih kurang
		Kurangnya SDM DPMPTSP yang secara disiplin ilmu berkesesuaian dengan jenis perizinan yang di tangani	Kompetensi dan pengalaman SDM DPMPTSP yang masih kurang memadai

D. ISU STRATEGIS

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok yaitu urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal di dalam urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.

Isu Strategis merupakan Permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*unresolved problem*). Identifikasi isu-isu tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya rasio kecukupan SDM terhadap beban kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
2. Perlunya peningkatan kompetensi SDM Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
3. Perlunya peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai kantor untuk memberikan pelayanan prima;
4. Perlunya kejelasan batas kewenangan antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tehnis dalam proses pelayanan perizinan;
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan; dan
6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perizinan bagi iklim usaha.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKj IP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2020 dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengampu urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasar urusan dan program yang diampu, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mendukung pencapaian 2 misi Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

- a. Misi 3 : *Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan; dan*
- b. Misi 5 : *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.*

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama sebanyak 3 (tiga) indikator.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	Pertumbuhan investasi di Kabupaten Banjar setiap Tahun	Perbandingan realisasi investasi dari Tahun N dengan tahun N-1	DPMPTSP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM berdasarkan hasil survey pelaku usaha	$\text{Nilai IKM} = \text{Nilai Indeks} \times 25 ;$ $\text{Nilai Indeks} = \sum (\text{Nilai unsur pelayanan} \times 0,11)$	DPMPTSP

Sumber : Surat Keputusan IKU SKPD

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2020 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya nilai investasi	1. Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	Persen	1	a. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	a. realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	rupiah	1.717.000.000,00	166.239.820,-	
					i. Pengembangan sistem informasi penanaman modal	i. Persentase Jumlah pelayanan peizinan yang berbasis IT	Persen	100	103.563.820,-	Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan
					ii. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	ii. Jumlah aplikasi pelayanan berbasis android	aplikasi	1	62.676.000,-	Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan
					b. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	b. Realisasi jumlah investor	Investor	60	18.325.950,-	- Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal - Bidang Penanaman Modal
					i. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan & pengawasan pelaksanaan penanaman modal	i. jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Laporan	60	16.300.000,-	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
					ii. Penyelenggaraan Pameran investasi	ii. Jumlah pameran investasi yang diikuti	Kali	1	0,-	Bidang Penanaman Modal

						iii	Pendampingan pameran promosi dan investasi	iii	Jumlah pendampingan pameran investasi yang diikuti	Kali	4	2.025.950,-	Bidang Penanaman Modal
						iv	Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi	iv	Dokumen RUPM	Dokumen	1	0,-	Bidang Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	82	a.	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	a.	IKM	Persen	82,1	167.750.000,-	
						i	Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal	i	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP	Persen	90	167.750.000,-	- Bidang Perijinan Jasa Usaha Bidang Perijinan Tertentu -Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan
									presentase penyelesaian pelayanan pengaduan masyarakat	Persen	100		Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan
									Jumlah dokumen IKM	dokumen	2		Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2020

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah Perjanjian kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk perjanjian kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$< 40\%$	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	1 - ((Realisasi investasi tahun N : target tahun N)*100%)	Persen	1	38,14	381	
Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	Jumlah nilai investasi yang masuk secara online maupun manual	Rupiah	1.717.000.000 .000	1.414.823.443.382	82,40	
Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Persentase Jumlah pelayanan peizinan yang berbasis IT	Jumlah pelayanan peizinan yang berbasis IT	persen	100	100	100	
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Jumlah aplikasi pelayanan berbasis android	Jumlah aplikasi pelayanan berbasis android	Aplikasi	1	2	200	
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Realisasi jumlah investor	Jumlah investor yang melaporkan LKPM secara online	Investor	60	30	50	

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan & pengawasan pelaksanaan penanaman modal	jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Perusahaan	80	354	442,5	
Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi	tersedianya hasil kajian / pemeliharaan penyusunan RUPM di kab. banjar	Jumlah dokumen penyusunan RUPM	dokumen	1	0	0	
Penyelenggaraan Pameran investasi	Jumlah pameran investasi yang diikuti	Jumlah pameran investasi yang diikuti	kali	1	0	0	
Pendampingan pameran promosi dan investasi	Jumlah pendampingan pameran investasi yang diikuti	Jumlah pendampingan pameran investasi yang diikuti	Kali	4	0	0	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM berdasarkan hasil survei pelaku usaha	Persen	82,1	79,68	97,05	
Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal	presentase Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP	presentase Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP	persen	90	100	111,1	
	presentase penyelesaian pelayanan pengaduan masyarakat	presentase penyelesaian pelayanan pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100	
	Jumlah dokumen IKM	Jumlah dokumen IKM	laporan	2	2	100	

Sumber : Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman dan Informasi Penanaman Modal, Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan (Tahun 2020)



Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja tahun 2020 paling tinggi diperoleh pada kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan & pengawasan pelaksanaan penanaman modal persentase pertumbuhan investasi sebesar 442,5 % yaitu banyaknya perusahaan yang melaporkan LKPM di Tahun 2020.

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2017		2018		2019		2020	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti	Persentase Realisasi Pengaduan Masyarakat = Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan perizinan yang telah ditindaklanjuti X 100%	persen	100	100	100	100	Tidak Menjadi Indikator lagi			
2	Persentase pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMDN/PMA)	Persentase realisasi investasi = ((realisasi investasi tahun ini - realisasi tahun sebelumnya) / realisasi tahun sebelumnya) X 100	persen	142,5	169,64	9016,14	10607,22	0,6	60%	38,14	381 %
	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah nilai investasi yang masuk secara online maupun manual	rupiah					1.024.139.054.828	60,24%	1.414.823.443.382	82,40
	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Jumlah pelayanan peizinan yang berbasis IT	persen					100	100%	100	100
	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Jumlah aplikasi pelayanan berbasis android	aplikasi					1	-	1	200
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah investor yang melaporkan LKPM secara <i>online</i>	investor					37	123,33 %	30	50
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan &	jumlah laporan pemantauan pelaksanaan	perusahaan					75	269 %	354	442,5

	pengawasan pelaksanaan penanaman modal	penanaman modal									
	Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen penyusunan RUPM	dokumen					-	-	1	0
	Penyelenggaraan Pameran investasi	Jumlah pameran investasi yang diikuti	kali					1	100%	1	0
	Pendampingan pameran promosi dan investasi	Jumlah pendampingan pameran investasi yang diikuti	kali					1	125%	1	1
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	83.09	101.70	82,58	100,83	82,90	100,09%	79,68	97,05
	Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal	presentase Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP	persen					100	125%	100	111,1
		presentase penyelesaian pelayanan pengaduan masyarakat	persen					100	100%	100	100
		Jumlah dokumen IKM	dokumen					2	100%	2	100

Sumber : Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman dan Informasi Penanaman Modal, Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan (Tahun 2020)

Nb : Indikator yang masih digunakan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.4

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN (Tahun Ke-)											Unit kerja (Bidang)	lokal
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	12	9	18	9	19	9	12	21	
Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya investasi	persentasi pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)		program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	- realisasi nilai investasi - IKM							419.128.760	Rp. 1.700.000.000.000	544.867.388	Rp. 1.717.000.000.000	708.327.604	Rp. 7.551.659.405.608	Bidang Penanaman Modal	
				Pengembangan sistem informasi penanaman modal di Daerah	Persentase jumlah pelayanan perizinan yang berbasis IT						100%	147.113.880	100%	191.248.044	100%	248.622.457	100%	Bidang Reklame, informasi dan pengaduan	
Meningkatnya kualitas	Meningkatnya kualitas	Indeks Kepuasan		Penyusunan sistem informasi penanaman modal di Daerah	Jumlah aplikasi pelayanan berbasis				-			1 aplikasi	272.014.880	1 aplikasi	353.619.344	1 aplikasi	459.705.147	3 aplikasi	

tata kelola pemerinta han	elayanan publik (perijinan)	Masyarakat (Perijinan)		android												pengaduan
			Peryederhanaan prosedur dan peningkatan elayanan penanaman modal	Presentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP (Bidang PJU)				80 %	646.863. 400	90 %	840.922. 420	90 %	1.093.1 99.146	90%	Bidang Penanaman Modal	
				Presentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP (Bidang PT)		-	-	80 %		90 %		90 %		90%	Bidang Penanaman Modal	
				Presentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP (Bidang Reklame)		-	-	100 %		100 %		100 %		100%	Bidang Penanaman Modal	
				Presentase penyelesai an elayanan pengaduan				100 %		100 %		100 a%		100%	Bidang Promosi dan Kerjasama	

		masyarakat														
		Jumlah dokumen IKM						2 dok		4 dok		6 dok		6 dok	Bidang Promosi dan Kerjasama	
	Prpgram peningkatan Promosi dan kerjasama investas	Realisasi jumlah investor	70 investor					30 investor	291.896.000	60 investor	379.464.800	90 investor	493.304.240	250 investor	Bidang Dalak	
	Peningkatannya kegiatan pemantauan, pem binaan, & pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah laporan pemantaua n pelaksanaa n penanama n modal						75 laporan	115.896.000	80 laporan	150.664.800	85 laporan	195.864.240	425 laporan	Bidang Dalak	
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan investasi	Jumlah peningkata n kualitas SDM pelayanan inestasi						20 ok	56.000.000	25 ok	72.800.000	25 ok	94.640.000	75 OK	Bidang Penanaman Modal	
	Penyelenggaraan pameran investasi	jumlah pameran investasi yang diikuti						1 kali	40.000.000	1 kali	52.000.000	1 kali	67.600.000	3 kali	Bidang Penanaman Modal	

			Pendampingan pameran promosi dan investasi	Jumlah pendampingan pameran investasi yang diikuti					7 kali	80.000.000	8 kali	104.000.000	8 kali	135.200.000	15 kali	Bidang Penanaman Modal	
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Sarana Prasarana Pelayanan Perijinan	Tersedianya layanan administrasi/ketat usaha yang memadai		Program Pelayanan Administrasi Perkantor	Tersedianya layanan administrasi/kegiatan yang memadai					100%	1.682.804.000	100%	1.851.084.400	100%	2.036.192.840	100%	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggara jasa surat menyurat					900 materai	3.900.000	990 materai	4.290.000	1089 materai	4.719.000		Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Terpenuhiya kebutuhan akan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 bulan	178.600.000	12 bulan	196.460.000	12 bulan	216.106.000	12 bulan	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kanto	Terpenuhiya akan jasa kebersihan kantor					12 bulan	32.014.080	12 bulan	35.215.488	12 bulan	38.737.036	12 bulan	Sekretariat	

			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya layanan administrasi/ketatausahaan yang memadai dan siap pakai					12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	36.300.000	12 bulan	sekretariat	
			Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan					12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.500.000	12 bulan	sekretariat	
			Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor					100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	sekretariat	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Realisasi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor					12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.050.000	12 bulan	sekretariat	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan					100%	27.000.000	100%	29.700.000	100%	32.670.000	100%	sekretariat	

			Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu					100%	210.200.000	100%	231.220.000	100%	254.342.000	100%	sekretariat	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhi biaya perjalanan dinas					100%	233.621.480	100%	256.983.628	100%	282.681.990	100%	sekretariat	
			Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran	Reward atau honor ptt dan panitia/tim kegiatan					100%	822.944.036	100%	905.238.439	100%	995.762.283	100%	sekretariat	
	Tersedianya sarana prasarana yang memadai dan siap pakai		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai					100%	346.000.000	100%	380.600.000	100%	418.660.000	100%	sekretariat	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Realisasi paket pengadaan peralatan gedung kantor					100%	111.000.000	100%	122.100.000	100%	134.310.000	100%	Sekretariat	

			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Realisasi paket pemeliharaan gedung kantor					100%	88.500.000	100%	97.350.000	100%	107.085.000	100%	sekretariat	
			Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	Realisasi kendaraan dinas kepala dinas					100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	sekretariat	
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Presentase jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik dan siap pakai					100%	76.500.000	100%	84.150.000	100%	92.565.000	100%	sekretariat	
			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Realisasi paket pemeliharaan peralatan kantor					100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.300.000	100%	sekretariat	
	Meningkatnya Kapasitas dan kinerja Sumber Daya Manusia DPMPSTP		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terbentuknya kompetensi SDM DPMPSTP melalui pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan					9 ok	99.000.000	10 ok	110.000.000	11 ok	121.000.000	11 ok	sekretariat	

				an													
	Meningkatnya pengelolaan laporan akuntabilitas keuangan DPMPTSP		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terbentuknya akuntabilitas pengelolaan keuangan DPMPTSP					100%	23.650.000	100%	26.015.000	100%	28.616.500	100%	sekretariat	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Laporan realisasi kinerja					100%	13.650.000	100%	15.015.000	100%	16.515.000	100%	sekretariat	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Buku laporan keuangan semesteran					1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	2.500.000	3 dokumen	sekretariat	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terselenggaranya laporan akhir tahun					1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	3 dokumen	sekretariat	

Sumber data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

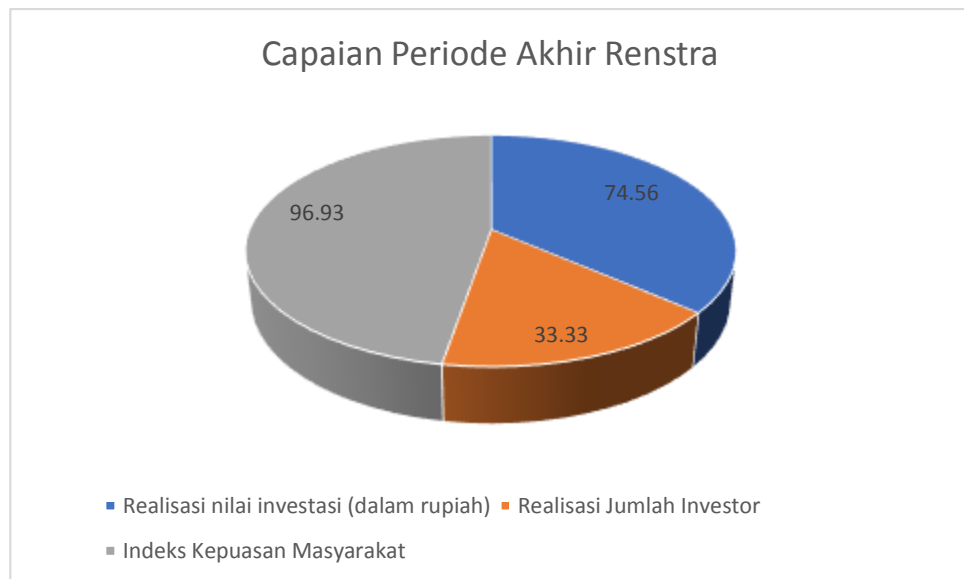
Indikator kinerja sasaran Tahun 2020 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun 2020 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2021, untuk mengetahui kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Target Periode Akhir

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Periode Akhir Renstra (2021)	Capaian Periode Akhir Renstra (2021)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	Persentase realisasi investasi = ((realisasi investasi tahun ini - realisasi tahun sebelumnya) / realisasi tahun sebelumnya) X 100	Persen	38,14	1	381 %
Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	Jumlah nilai investasi yang masuk secara online maupun manual	Rupiah	1.414.823.443.382	1.734.170.000.000	81,58 %
Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Persentase Jumlah pelayanan peizinan yang berbasis IT	Jumlah pelayanan peizinan yang berbasis IT	persen	100	100	100 %
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Jumlah aplikasi pelayanan berbasis android	Jumlah aplikasi pelayanan berbasis android	Aplikasi	2	1	200 %
Program peningkatan promosi dan kerjasama	Realisasi jumlah investor	Jumlah investor yang melaporkan LKPM secara	Investor	30	90	33,33 %

investasi		online				
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan & pengawasan pelaksanaan penanaman modal	jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Perusahaan	354	85	416,4 %
Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi	tersedianya hasil kajian / pemeliharaan penyusunan RUPM di kab. banjar	Jumlah dokumen penyusunan RUPM	dokumen	0	-	0
Penyelenggaraan Pameran investasi	Jumlah pameran investasi yang diikuti	Jumlah pameran investasi yang diikuti	kali	0	1	0
Pendampingan pameran promosi dan investasi	Jumlah pendampingan pameran investasi yang diikuti	Jumlah pendampingan pameran investasi yang diikuti	Kali	0	5	0
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	79,68	82,2	96,93 %
Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal	presentase Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP	presentase Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP	persen	100	100	100 %
	presentase penyelesaian pelayanan pengaduan masyarakat	presentase penyelesaian pelayanan pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100 %
	Jumlah dokumen IKM	Jumlah dokumen IKM	laporan	2	2	100 %

Sumber : Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman dan Informasi Penanaman Modal, Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan (Tahun 2020)



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja utama, realisasi tahun 2020 berbanding dengan target akhir renstra tahun 2021 paling tinggi berada pada Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai sebesar 96,93 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kabupaten Banjar pada rentang Tahun 2016 - 2021 merasakan kepuasan dalam mendapatkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pada indikator kinerja utama realisasi investasi (dalam rupiah) berbanding dengan target akhir renstra tahun 2021 memperoleh capaian sebesar 81,59 %. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian investasi di Kabupaten Banjar masih perlu ditingkatkan kembali.

Sedangkan, pada indikator kinerja utama realisasi jumlah Investor berbanding dengan target akhir renstra tahun 2021 memperoleh capaian sebesar 33,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya investor dalam berinvestasi di Kabupaten Banjar.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

B.1 SASARAN 1

“Meningkatnya nilai investasi”

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya nilai investasi melalui 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan capaian **kurang berhasil** dan 1 (satu) Indikator **Cukup Berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

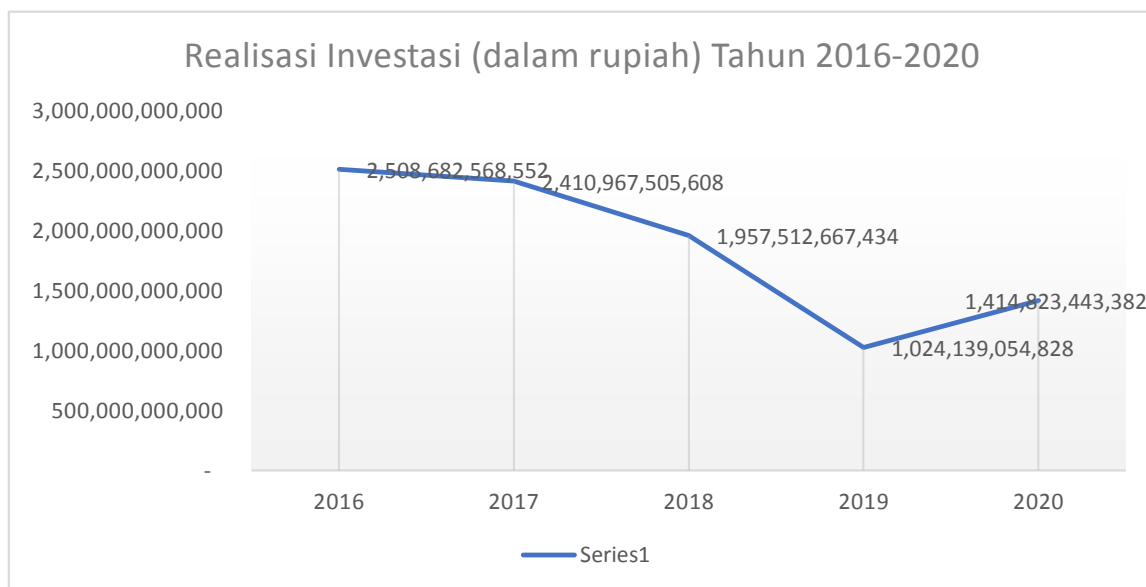
Tabel 3.6

Realisasi Indikator Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	1 %	38,14 %	381

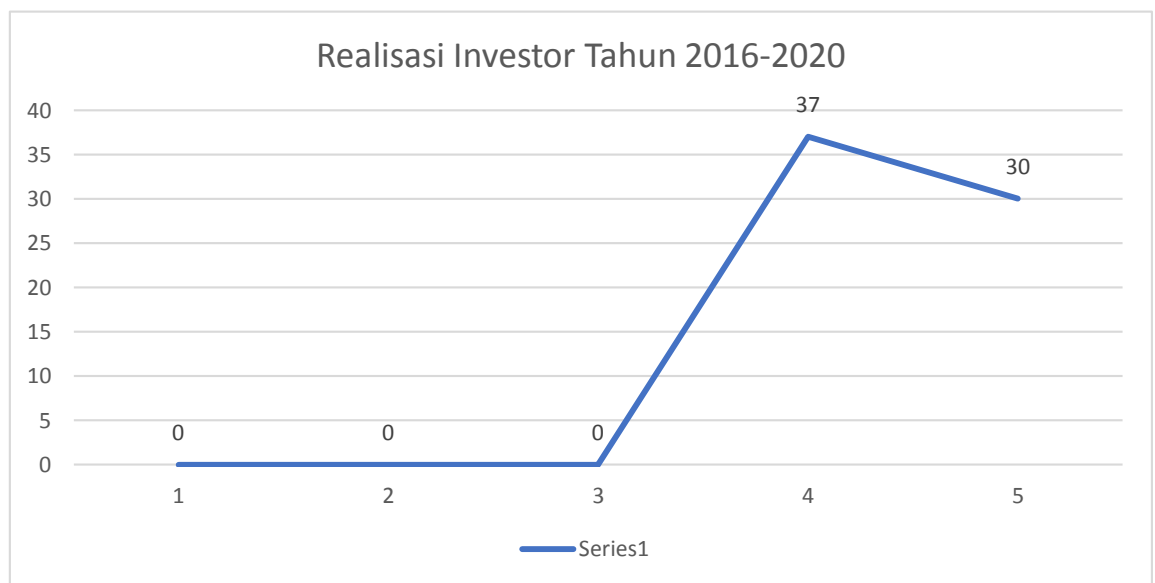
Sumber : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Tahun 2020

Pada tahun 2020 Kabupaten Banjar mengalami peningkatan nilai investasi sebesar Rp 1.414.823.443.382,-. Bila dibandingkan dengan jumlah investasi Tahun 2019 sebesar Rp 1.024.139.054.828,- maka akan menunjukkan adanya pertumbuhan investasi sebesar 38,14%. Peningkatan hal tersebut juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah investor baru sebesar 30 investor di Tahun 2020. Adapun pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Banjar didukung oleh adanya Kemudahan Pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik dimana semua pelayanan perizinan terpusat.



Berdasarkan grafik di atas, terlihat pertumbuhan investasi di Kabupaten Banjar dari Tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 diperoleh investasi sebesar Rp 2.508.682.568.552,- dan mengalami penurunan di tahun 2017 dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 2.410.967.505.608,- dan penurunan sebesar 4,05 %. Dari tahun 2017 ke tahun 2018, pertumbuhan investasi mengalami penurunan kembali dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 1.957.512.667.434,- dan penurunan sebesar 23,16%. Pada tahun 2019, pertumbuhan investasi mengalami penurunan kembali dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 1.024.139.054.828,- dan penurunan tersebut dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 91,13%. Sedangkan pada tahun 2020, pertumbuhan investasi mengalami kenaikan dengan realisasi investasi sebesar Rp 1.414.823.443.382,- dan kenaikan tersebut sebesar 38,14%.

Data realisasi investasi ini, diperoleh berdasarkan hasil Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Laporan tersebut dari tahun 2013 hingga sekarang masih digunakan sebagai pedoman dalam mengetahui realiasi investasi yang ada di Kabupaten Banjar.



Berdasarkan grafik di atas, terlihat jumlah investor yang masuk di Kabupaten Banjar. Indikator ini mulai ditetapkan pada tahun 2019. Terlihat bahwa ada penurunan jumlah investor baru di Kabupaten Banjar sebanyak 7 investor dengan jumlah persentase sebesar 81,08 %.

Faktor keberhasilan/kegagalan sasaran ini adalah :

- 1) Perusahaan besar tidak dapat melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dikarenakan data perusahaan dipegang oleh pusat perusahaan. Sedangkan untuk meminta data ke pusat sangat dipersulit sekalipun

anak cabang perusahaan yang berada di Kabupaten Banjar. Jadi perusahaan tersebut melaporkan Investasi nya (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) melalui Pusat. Sehingga Nilai Realisasi Investasi tidak masuk secara maksimal di Kabupaten Banjar.

- 2) Beberapa perusahaan melaporkan Nilai Realisasi Investasi Nol rupiah (Rp.0) dikarenakan perusahaan belum memahami tata cara melaporkan serta dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal perlu melakukan konsultasi dengan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal.
- 3) Email yang dimasukkan di OSS terkadang ada yang tidak aktif atau tidak bisa digunakan sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengirimkan Hak Akses melalui email tersebut. Sehingga para pelaku usaha harus mengirimkan email ke *Helpdesk* untuk meminta mengirimkan ulang Hak Akses ke email perusahaan yang aktif. Hal tersebut cukup memakan waktu selama beberapa hari sehingga menghambat waktu pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- 4) Adanya pembatasan atau lockdown akibat pandemic Covid-19 membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran (sesuatu yang menjadi perhatian ditahun yang akan datang) :

- 1) Bidang Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal akan memberikan surat teguran terkait perusahaan yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan perlu memberikan reward dan funishmen dari Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan yang tertib dan yang tidak tertib dalam melaporkan Kegiatan Penanaman Modal Perusahaannya ; dan
- 2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal akan melakukan Sosialisasi, serta pendampingan terhadap perusahaan yang belum memahami Laporan Kegiatan Penanaman Modal .

Upaya perbaikan :

- 1) Berusaha berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI mengenai cabang perusahaan yang pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modalnya masih mengikuti perusahaan pusat untuk dapat melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal cabang secara mandiri sehingga nilai realisasi investasi di cabang tidak “0” rupiah.

- 2) Berusaha untuk terus aktif melakukan sosialisasi kepada investor mengenai betapa pentingnya melakukan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal per triwulan melalui email, WhatsApp dan mengunjungi langsung investor.

Berdasarkan data pada tabel 3.3 pada indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMDN/PMA) mengalami kenaikan. Jika tahun 2019 pertumbuhan investasi hanya meningkat sebesar 60 %, maka tahun 2020 pertumbuhan investasi meningkat sebesar 262 %. Hal ini disebabkan adanya beberapa perusahaan baru yang masuk serta perusahaan-perusahaan sebelumnya tetap melaporkan kegiatan Penanaman Modal ke aplikasi *online* yang dikelola langsung oleh BKPM RI.

Berdasarkan data tabel 3.5 pada indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMDN/PMA) Tahun 2020 sebesar 381 % jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra Tahun 2021 sebesar 1 % maka capaian pada akhir periode renstra tersebut sebesar 381 %.

B.2. SASARAN 2

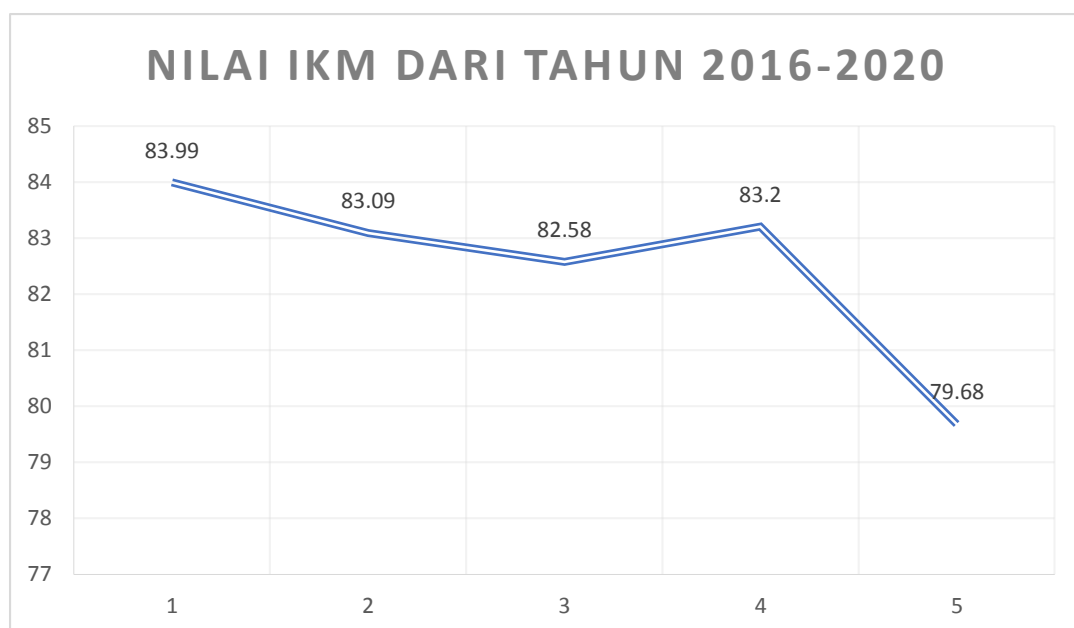
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui 1 (satu) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan **Cukup Berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,1	79,68	97,05

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020



Berdasarkan grafik di atas, terlihat pergerakan Nilai IKM dari tahun 2016-2020. Nilai IKM tersebut, dari tahun 2016 - 2018 mengalami penurunan dalam penilaian, namun tetap dalam kategori Baik. Pada tahun 2019, nilai IKM mengalami kenaikan dengan nilai 83,2. Pada tahun 2020, mengalami penurunan dengan nilai 79,68.

Faktor keberhasilan/kegagalan sasaran ini adalah :

- 1) Kurang cepatnya waktu pelayanan (Estimasi Penyelesaian Perijinan)

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran (sesuatu yang menjadi perhatian ditahun yang akan datang) :

- 1) Proses selesai berkas izin disesuaikan dengan standar di SOP

Upaya perbaikan :

1. Waktu penyelesaian berkas izin sesuai estimasi untuk pelayanan prima kepada masyarakat
2. Penyempurnaan integrasi data dan Online seluruh pelayanan Perijinan

Berdasarkan data pada tabel 3.3 pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan. Jika tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,90, maka tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan dengan angka sebesar 79,68 %. Hal ini disebabkan karena kurang cepatnya proses penyelesaian berkas izin (estimasi penyelesaian perijinan yang melampau estimasi yang di terapkan) sehingga

masyarakat kurang merasakan puas terhadap pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 diperoleh berdasarkan jumlah responden sebanyak 396 responden dan dari 9 unsur pelayanan yang dikelola di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun rincian total responden berdasarkan jenis kelamin untuk IKM di Tahun 2020, yaitu :

No	Jenis Kelamin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des
1	Laki-laki	7	7	1	4	5	29	36	18	19	16	46	32
2	Perempuan	8	5	1	3	3	6	21	17	23	20	38	31
3	Tidak Menjawab	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0

Berdasarkan data tabel 3.5 pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 sebesar 79,68 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra Tahun 2021 sebesar 82,2 maka capaian pada akhir periode renstra tersebut hanya sebesar 96,93 %.

C. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 untuk melaksanakan 7 program dengan 27 kegiatan sebesar Rp 4.671.428.096,- (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) kemudian mengalami pengurangan pagu anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi sebesar Rp. 2.484.937.986,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau pengurangan sebesar Rp. 2.186.490.110,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar 46,81% dari anggaran semula kemudian pada saat Perubahan mengalami kenaikan pagu anggaran dari nilai Pagu setelah Rasionalisasi sebesar Rp.2.784.937.987,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.717.844.736,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) (99.43%) dan realisasi fisik sebesar 99.43%.

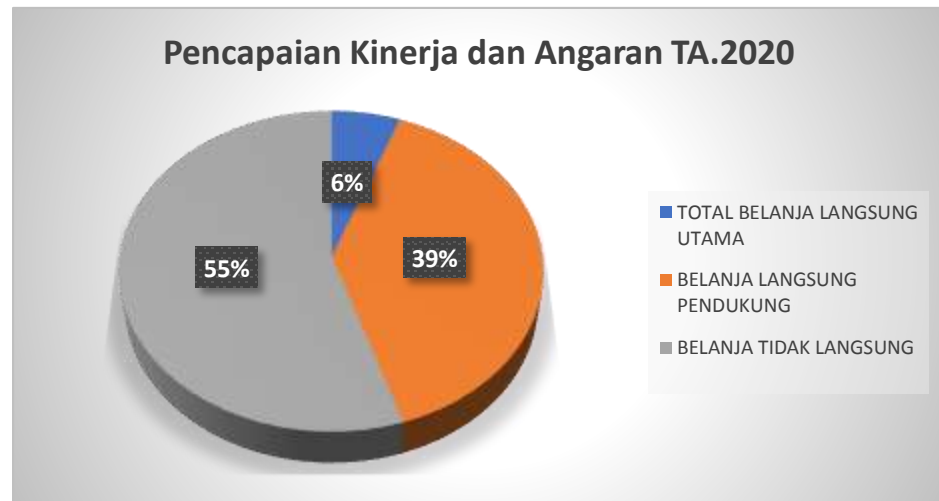
Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah

sebesar Rp 6.039.016.652,- (92,50 %) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 3.321.171.916,- (88,71% dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 2.717.844.736,- (96,88% dari total realisasi).

Realisasi anggaran belanja langsung untuk program utama sebesar Rp 346.751.232,- (98,42 % dari total anggaran yang dilokasikan setelah perubahan anggaran untuk program utama sebesar Rp 352.315.770,-) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung program pendukung sebesar Rp 2.439.472.217,- (97,20 % total anggaran yang dilokasikan setelah perubahan untuk program pendukung sebesar Rp 2.371.173.504,-), dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.321.171.916,- (88,71 % dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 3.743.970.333,-).

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
					(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	1	38,14 %	381	184.565.770	181.547.376	98,36 %
1.1	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	1.717.000.000.000	1.414.823.443.382	82,40	166.239.820	163.301.426	98,23 %
	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Persentase Jumlah pelayanan peizinan yang berbasis IT	100	100	100	103.563.820	101.576.224	98,08 %
	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Jumlah aplikasi pelayanan berbasis android	1	1	100	62.676.000	61.725.202	98.48 %
1.2	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Realisasi jumlah investor	60	30	50	18.325.950	18.325.950	100 %
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan & pengawas-an pelaksanaan penanaman modal	jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	80	354	442,5	16.300.000	16.300.000	100 %
	Kajian Sumber Daya yang terkait dengan Investasi	Dokumen	1	0	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Pameran investasi	Jumlah pameran investasi yang diikuti	1	0	0	0	0	0
	Pendampingan pameran promosi dan investasi	Jumlah pendampingan pameran investasi yang diikuti	4	0	0	2.025.950	2.025.950	100 %
	2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,1	79,68	97,05	167.750.000	165.123.856
2.1	program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	IKM	82,1	79,68	97,05	167.750.000	165.123.856	98,43 %
	Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal	presentase Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP	90	100	111,1	167.750.000	165.123.856	98,43 %
		presentase penyelesaian pelayanan pengaduan masyarakat	100	100	100			
		Jumlah dokumen IKM	2	2	100			
TOTAL BELANJA LANGSUNG UTAMA						352.315.770	346.671.232	98,40 %
BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG						2.439.474.217	2.371.173.504	97,20 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG						3.743.970.333	3.321.171.916	88,71 %



Berdasarkan tabel 3.8 dan grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di dominasi oleh belanja tidak langsung sebesar 55 %, sedangkan untuk belanja langsung terealisasi sebesar 45 % dengan rincian belanja langsung program utama sebesar 6 % dan belanja langsung program pendukung sebesar 39 %. Hal ini disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran dimasa pandemic *Covid-19*.

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 sasaran, menunjukkan pencapaian yang baik, yaitu sasaran Meningkatnya Nilai Investasi mencapai nilai lebih dari 100% sedangkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik mencapai kinerja kurang dari 100%. Untuk sasaran 1, mencapai kinerja sebesar 262 % dengan realisasi anggaran sebanyak 98,36 %. Sedangkan untuk sasaran 2, mencapai kinerja sebesar 97,05% dengan realisasi anggaran sebanyak 98,43%. Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencukupi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.9
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6 (100% - Kol 5)
1.	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	38,14%	98,36 %	1,64 %
	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	82,40	98,23 %	1,77 %
	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Persentase Jumlah pelayanan peizinan yang berbasis IT	100	98,08 %	1,92 %
	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Jumlah aplikasi pelayanan berbasis android	100	98.48 %	1,52 %
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Realisasi jumlah investor	50	100 %	100 %
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan & pengawasan pelaksanaan penanaman modal	jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	442,5	100 %	0
	Kajian Sumber Daya yang terkait dengan Investasi	Dokumen	0	0	-
	Penyelenggaraan Pameran investasi	Jumlah pameran investasi yang diikuti	0	0	-
	Pendampingan pameran promosi dan investasi	Jumlah pendampingan pameran investasi yang diikuti	0	100 %	0
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,1	98,43 %	1,57 %
	program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	IKM	82,1	98,43 %	1, 57 %
	Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal	presentase Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP	90	98,43 %	1, 57 %
		presentase penyelesaian pelayanan pengaduan masyarakat	100		
		Jumlah dokumen IKM	2		

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2019

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Tahun 2019 memperoleh nilai 75,92 dengan interpretasi predikat BB, maka pada tahun 2019 direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan yang ditetapkan belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) ;
2. Target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran;
3. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
4. Laporan kinerja belum dipublikasikan ke website;
5. Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*; dan
6. Informasi mengenai kinerja belum mencantumkan asal sumber data.

D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan indikator Kinerja Tujuan yang memenuhi kriteria indikator;
2. Target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan untuk dapat menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja sebagai pelaporan;
4. Laporan kinerja dipublikasikan ke dalam *website*.
5. Hasil pengukuran kinerja untuk dapat dijadikan dasar *reward* dan *punishment*;
6. Mencantumkan asal sumber data informasi kinerja.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Meningkatnya Nilai investasi daerah tahun 2020 dapat diketahui dengan cara membandingkan realisasi pertumbuhan investasi yang ada dari tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Persentase capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yang diperoleh yaitu persentase pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA) hingga saat ini terealisasi sebesar Rp. 1.414.823.443.382,- atau mengalami kenaikan sebesar 38,14 % dari tahun 2019.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat dari nilai IKM. Nilai IKM adalah Nilai dari Indeks Pelayanan Perizinan atau nilai dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan untuk DPMPTSP dari pemohon. Capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yang diperoleh yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan hingga saat ini terealisasi sebesar 79,68 % . Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ini tidak mencapai target pada tahun 2020 yaitu 82,1 %.

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut: (tidak memuat kendala perihal anggaran)

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar lebih aktif mengingatkan investor dalam penginputan Laporan Kegiatan Penanaman Modal setiap triwulan serta terus melakukan sosialisasi dan pendampingan, disamping pemberian *reward* dan *punishment* terhadap perusahaan yang tertib dan tidak tertib dalam memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
2. Terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam segi sumber daya manusianya maupun sarana untuk menunjang kegiatan sasaran ini dengan mengupayakan terintegrasinya semua layanan secara bertahap dan semua layanan perizinan secara bertahap dibuat secara *online*.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

.....

.....